Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 11 No. 4 Tahun 2026, pp. 942 – 958
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i4.7501
■ Received 29/06/2026 ■ Revised 18/09/2026 ■ Accepted 22/09/2026

Participation, Deliberation, and Representation in Indonesia's Disaster-Resilient Village Program

Rizky Ghoffar Ismail[1*)], Sri Suwitri[2)], Lisa Mandasari[1)], Arrahman Syafebri[1)], Sena Putra Prabujaya[1)]

[1)]Public Administration Sriwijaya University, Palembang, Indonesia
[2)]Public Administration Diponegoro University, Semarang, Indonesia

Email correstpondence : rizkyghofarismail@fisip.unsri.ac.id*

Abstract

Purpose: This study aims to examine how participation, deliberation, and representation are conceptualized and implemented within Indonesia's Disaster-Resilient Village Program (*Destana*) from a deliberative governance perspective.

Design/methodology/approach: This study employed a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA framework. Relevant articles were retrieved from the Scopus database using predetermined inclusion and exclusion criteria. A total of 32 articles were selected and analyzed through thematic coding supported by NVivo software.

Findings: The findings reveal that participation is the most dominant dimension in Indonesia's disaster governance literature, particularly regarding sustainability of participation and community involvement in planning processes. In contrast, deliberation processes and representation receive relatively limited attention. The review also identifies persistent challenges, including pseudo-participation, limited equality among actors, and inadequate representation of vulnerable groups in disaster decision-making processes.

Practical Implication: The findings suggest that policymakers and disaster management practitioners should strengthen inclusive deliberative mechanisms by expanding public participation, enhancing representation of vulnerable groups, and promoting substantive dialogue in disaster governance..

Originality/value: This study contributes to the disaster governance literature by integrating participation, deliberation, and representation within a deliberative governance framework to analyze Indonesia's Disaster-Resilient Village Program. The study offers a comprehensive understanding of the current state of deliberative governance in community-based disaster management.

Keywords: deliberative governance; disaster governance; disaster-resilient village; participation; systematic literature review.
Paper type: Review Paper

Copyright (c) 2026 The Author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Disclosure statement: The authors do not have any conflict of interest

Partisipasi, Musyawarah, dan Representasi dalam Program Desa Tangguh Bencana di Indonesia

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana partisipasi, deliberasi, dan representasi dikonseptualisasikan serta diimplementasikan dalam Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Indonesia melalui perspektif *deliberative governance*.

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan kerangka PRISMA. Artikel diperoleh dari basis data Scopus berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Sebanyak 32 artikel terpilih dianalisis menggunakan teknik *thematic coding* yang didukung oleh perangkat lunak *NVivo*.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi merupakan dimensi yang paling dominan dalam literatur tata kelola kebencanaan di Indonesia, terutama pada aspek keberlanjutan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Sebaliknya, dimensi proses deliberasi dan representasi masih memperoleh perhatian yang relatif terbatas. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan, seperti *pseudo-participation*, keterbatasan kesetaraan antaraktor, serta rendahnya keterwakilan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan kebencanaan.

Implikasi Praktis: Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah dan praktisi kebencanaan untuk memperkuat mekanisme tata kelola yang lebih inklusif melalui perluasan partisipasi publik, peningkatan representasi kelompok rentan, serta penguatan dialog substantif dalam pengurangan risiko bencana.

Originalitas/Nilai: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur tata kelola kebencanaan dengan mengintegrasikan dimensi partisipasi, deliberasi, dan representasi dalam kerangka *deliberative governance* untuk menganalisis Program Desa Tangguh Bencana di Indonesia. Studi ini menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual tata kelola deliberatif dalam pengelolaan bencana berbasis masyarakat.

Kata Kunci: *deliberative governance*; tata kelola kebencanaan; desa tangguh bencana; partisipasi; *systematic literature review*.

Jenis Penelitian: Review Paper

PENDAHULUAN

Posisi Indonesia pada pertemuan tiga lempeng tektonik dan kawasan *Ring of Fire* menyebabkan tingginya risiko berbagai bencana, seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, tsunami, dan bencana hidrometeorologi. (Djalante, 2016). Hal tersebut mengharuskan Indonesia memiliki tata Kelola pelaksanaan kebencanaan yang relevan dan di Indonesia sendiri telah terjadi kemajuan dari pendekatan *state-centered disaster management* menuju *community resilience*, *collaborative governance*, dan *participatory disaster governance*. Kemajuan ini ditandai oleh berkembangnya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, kolaborasi multiaktor, dan penguatan kapasitas komunitas lokal dalam pengelolaan risiko bencana (Khafian, 2023). Salah satu implementasi tata kelola kebencanaan berbasis masyarakat di Indonesia adalah Program Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Program ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengurangan risiko bencana melalui penguatan kapasitas komunitas, kelembagaan lokal, dan resiliensi berbasis masyarakat. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2025 juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, penguatan kapasitas masyarakat, serta integrasi kearifan lokal dan entitas adat dalam penyelenggaraan Destana (Kepala BNPB, 2025). Dalam konteks tersebut, perspektif *deliberative governance* menjadi relevan karena menekankan pentingnya partisipasi, representasi, dan deliberasi publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Kualitas tata kelola tidak hanya diukur dari efektivitas implementasi kebijakan, tetapi juga dari kualitas dialog, kesetaraan posisi antaraktor, akses informasi, dan kemampuan mengakomodasi aspirasi masyarakat (Kismartini et al., 2024). Meskipun demikian, kajian mengenai *deliberative governance* dalam governance kebencanaan di Indonesia masih terbatas dan cenderung parsial. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada *community participation*, *collaborative governance*, *disaster resilience*, atau *community-based disaster management* secara terpisah. Selain itu, meskipun regulasi Destana telah menempatkan kearifan lokal sebagai elemen penting, studi yang mengkaji *local wisdom* sebagai mekanisme *deliberative governance* masih terbatas (Djalante, 2016). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya literatur penelitian mengenai tata Kelola kebencanaan di Indonesia semakin menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, serta kolaborasi lintas aktor dalam membangun kapasitas dan resiliensi terhadap bencana (Alhadi et al., 2024; Fitriyati et al., 2024; Hermawan et al., 2024; Khalwani et al., 2026).

Selain partisipasi, keterlibatan para pemangku kepentingan dan kolaborasi lintas aktor, beberapa penelitian menunjukkan pentingnya komunikasi, pertukaran informasi, dialog, kepercayaan, serta proses pengambilan keputusan bersama dalam memperkuat tata kelola kebencanaan (Pratama & Nurmandi, 2020; Purworini et al.,

2026; Roza Krisnandhi Kausar & Agustan, 2025). Namun, beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan partisipasi dan kolaborasi belum selalu menunjukkan adanya kesetaraan pengaruh masyarakat dalam proses tata kelola. Hal ini ditunjukkan adanya ketimpangan antara pengetahuan teknokratis pemerintah dan ahli dengan pengetahuan lokal masyarakat dalam diskursus kebencanaan .(Saputra et al., 2025). Sementara itu,pada tahap implementasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat relatif kuat, akan tetapi lebih terbatas pada proses evaluasi dan masih bersifat parsial dalam aspek representasi.(Kusumah et al., 2026).

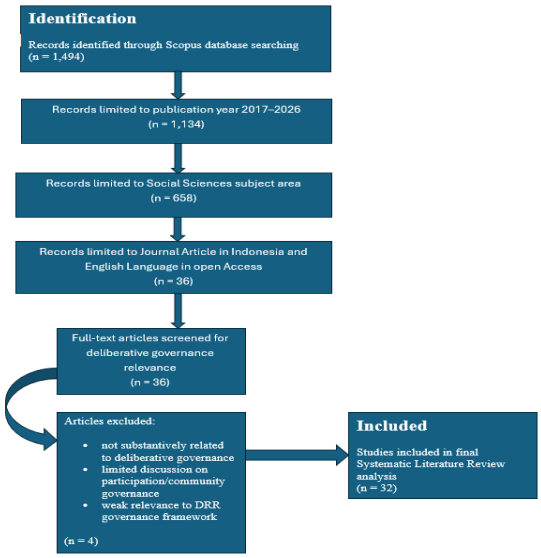
Hasil-hasil Penelitian selajutnya Dalam konteks yang berbeda, yang menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dan proses transmisi pengetahuan antargenerasi berkontribusi terhadap kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi bencana. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan lokal dalam membangun resiliensi, tetapi belum secara khusus menjelaskan bagaimana pengetahuan tersebut memperoleh ruang dalam proses deliberasi dan pengambilan keputusan formal.(Arni et al., 2026).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, kajian tata kelola kebencanaan di Indonesia telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap partisipasi masyarakat, kolaborasi antaraktor, komunikasi, dan kapasitas komunitas. Namun, kajian tersebut masih cenderung membahas partisipasi, proses deliberasi, dan representasi secara parsial. Belum banyak kajian yang secara sistematis mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut untuk menjelaskan apakah keterlibatan masyarakat tidak hanya terjadi pada tahap implementasi, tetapi juga memberikan ruang dialog, pertukaran argumentasi, dan representasi kepentingan yang setara dalam proses tata kelola kebencanaan. Ketiga dimensi tersebut merupakan kerangka *deliberative governance* yang mencakup dimensi partisipasi, proses deliberasi, dan representasi serta digunakan dalam penelitian ini untuk mensintesis tata kelola kebencanaan berbasis masyarakat di Indonesia.Integrasi tersebut memungkinkan penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi keberadaan partisipasi masyarakat, tetapi juga menilai sejauh mana partisipasi tersebut berkembang menuju proses deliberasi yang substantif dan representasi kepentingan masyarakat yang setara.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dan *thematic synthesis* berbasis NVivo untuk mengidentifikasi, mensintesis, dan menganalisis dimensi, indikator, serta pola implementasi *deliberative governance* dalam *governance* kebencanaan berbasis masyarakat di Indonesia (Houghton et al., 2017). Penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana *deliberative governance* didefinisikan dalam program *disaster-resilient village* di Indonesia; (2) dimensi dan indikator apa saja yang diidentifikasi dalam literatur; dan (3) pola implementasi serta temuan dominan apa yang muncul dalam studi terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji *deliberative governance* dalam *governance* kebencanaan di Indonesia, khususnya pada konteks Program Desa Tangguh Bencana (Destana). Pendekatan SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap perkembangan suatu bidang penelitian (Snyder, 2019). Penelitian mengadopsi kerangka PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) guna memastikan bahwa proses identifikasi, *screening*, *eligibility*, dan *inclusion* artikel dilakukan secara sistematis dan transparan (Page et al., 2021). Pendekatan SLR dipandang relevan karena kajian *deliberative governance* dalam *governance* kebencanaan di Indonesia masih tersebar pada berbagai jenis bencana dan perspektif *governance* yang berbeda. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus karena memiliki cakupan publikasi internasional yang luas dan bereputasi tinggi. Pencarian artikel menggunakan *Boolean search string*: TITLE-ABS-KEY (("participation" OR "community participation" OR "public participation") AND ("disaster management" OR "disaster risk reduction" OR "disaster resilience") AND (local OR community OR village)), dengan tambahan filter berupa artikel jurnal (*article*), bidang ilmu sosial (*Social Sciences*), berbahasa Inggris, *open access*, berafiliasi di Indonesia, serta dipublikasikan pada periode 2017–2026. Seluruh proses seleksi artikel mengikuti tahapan PRISMA sebagai dasar *inclusion* dan *exclusion* dalam penelitian ini.



Gambar 1. Diagram PRISMA
Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan Prisma 2020 (Page et al., 2021)

Analisis Data Menggunakan NVIVO

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan *thematic analysis* yang didukung oleh perangkat lunak NVivo untuk memfasilitasi proses *qualitative coding*, *matrix coding query*, dan identifikasi pola *deliberative governance* dalam literatur governance kebencanaan di Indonesia. Penggunaan NVivo dalam sintesis bukti kualitatif membantu meningkatkan transparansi proses analisis, mulai dari pengorganisasian data hingga pengembangan sintesis tematik.(Houghton et al., 2017). Proses analisis menggunakan pendekatan *memo-based qualitative coding*, di mana setiap artikel terlebih dahulu dirangkum ke dalam memo analitis sebelum dikodekan ke dalam *thematic nodes* guna meningkatkan transparansi dan mempermudah sintesis tematik lintas artikel (Hartono Hartono et al., 2025). Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama *deliberative governance*, yaitu *Participation*, *Deliberation Process*, dan *Representation*. Proses *coding* dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam ketiga dimensi tersebut beserta subdimensinya, seperti *sustainability of participation*, *consensus-building*, *access to information*, *community representation*, *pseudo-participation*, dan *pseudo-representation*. Selanjutnya, *matrix coding query* dan *thematic synthesis* digunakan untuk mengidentifikasi pola implementasi dan kecenderungan dominan lintas artikel, sehingga menghasilkan tidak hanya frekuensi *coding*, tetapi juga sintesis tematik mengenai bagaimana *deliberative governance* dipahami, dioperasionalisasikan, dan diimplementasikan dalam literatur *governance* kebencanaan berbasis masyarakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

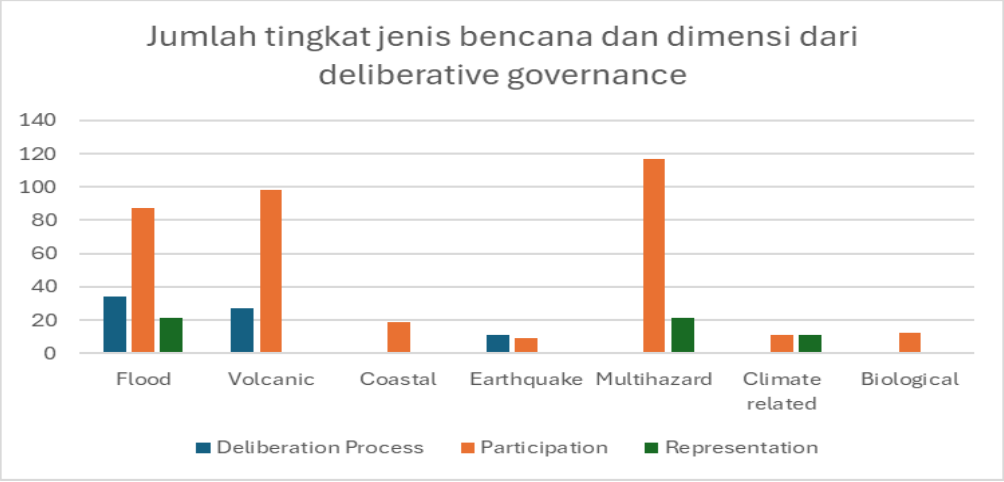
Hasil

Jenis bencana berdasarkan perspektif Deliberative Governance

Penelitian ini berpijak pada perspektif *deliberative governance* yang dikembangkan oleh Kismartini et al., yang menekankan bahwa kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan, tetapi juga oleh kualitas partisipasi, representasi, dan proses deliberasi antaraktor (Kismartini et al., 2024). Dalam konteks tata kelola kebencanaan, perspektif ini memandang bahwa perumusan dan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana memerlukan keterlibatan substantif masyarakat terdampak, kelompok rentan, tokoh adat, serta pemangku kepentingan lokal agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Hasil *matrix coding* menunjukkan bahwa dimensi *Participation* merupakan dimensi *deliberative governance* yang paling dominan dalam literatur kebencanaan di Indonesia, terutama pada studi *multihazard* (117 *coding references*), *volcanic disaster* (98), dan *flood disaster* (87). Temuan ini menunjukkan bahwa literatur governance kebencanaan di Indonesia masih berorientasi pada keterlibatan masyarakat, *community-based resilience*, dan implementasi partisipatif dalam

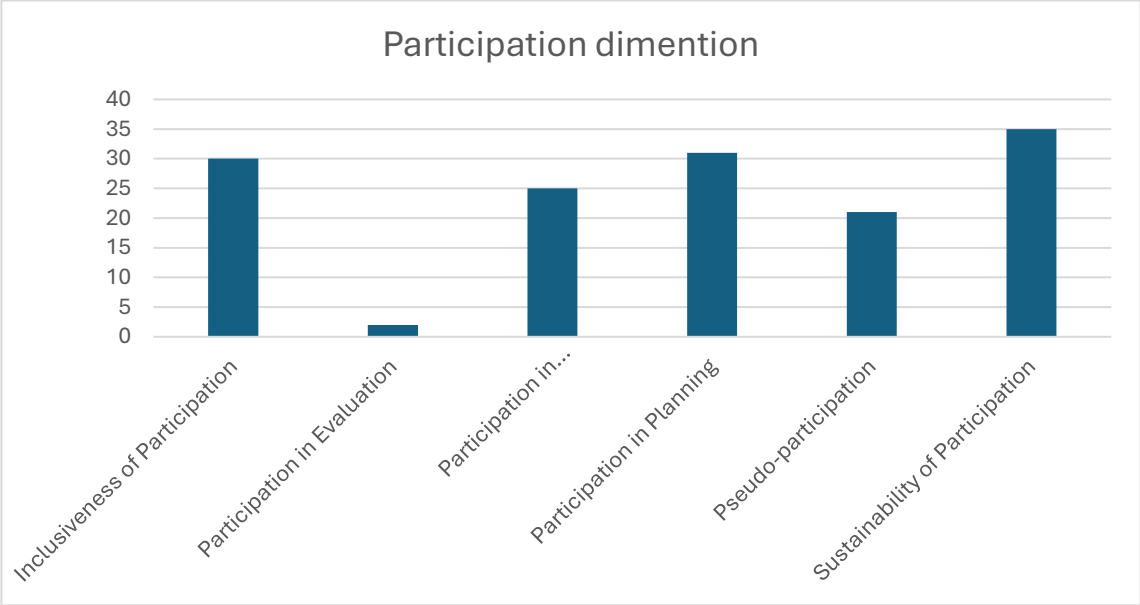
pengurangan risiko bencana (Lassa et al., 2023; Setijaningrum et al., 2024; Universitas Islam Bandung, Indonesia et al., 2020; Yumarni & Amaratungga, 2017).

Sebaliknya, dimensi *Deliberation Process* muncul dengan intensitas yang lebih rendah, meskipun relatif kuat pada studi banjir (34 *coding references*) dan bencana vulkanik (27 *coding references*). Temuan ini menunjukkan bahwa *governance* kebencanaan pada kedua konteks tersebut lebih banyak membahas dialog antar-*stakeholder*, koordinasi komunitas, *collaborative governance*, dan komunikasi dalam mitigasi bencana (Danar, 2025; McDermott et al., 2025; Putera et al., 2025). Sementara itu, dimensi *Representation* menjadi dimensi yang paling sedikit muncul dalam keseluruhan dataset. Dimensi ini hanya relatif kuat pada studi *flood disaster* dan *multihazard* (masing-masing 21 *coding references*) serta *climate-related disaster* (11 *coding references*). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa isu representasi kelompok rentan, kesetaraan suara, *gender inclusion*, dan *disability inclusion* masih belum menjadi fokus utama dalam literatur *governance* kebencanaan di Indonesia. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa literatur kebencanaan di Indonesia masih didominasi oleh *participation-based governance* yang menekankan *community engagement* dan implementasi resiliensi, namun relatif terbatas dalam penguatan *representational equality* dan *substantive deliberative process*. Dengan demikian, governance kebencanaan di Indonesia masih lebih didominasi oleh pendekatan partisipatif-komunitarian dibanding deliberasi substantif yang menempatkan seluruh kelompok sosial pada posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan kebencanaan (Dalimunthe, 2018; Ida et al., 2025; Setijaningrum et al., 2024).



Gambar 2. Jumlah jenis bencana berdasarkan dimensi deliberative governance
Sumber : Hasil olahan peneliti berdasarkan *coding* NVivo (2026).

Dimensi Partisipasi



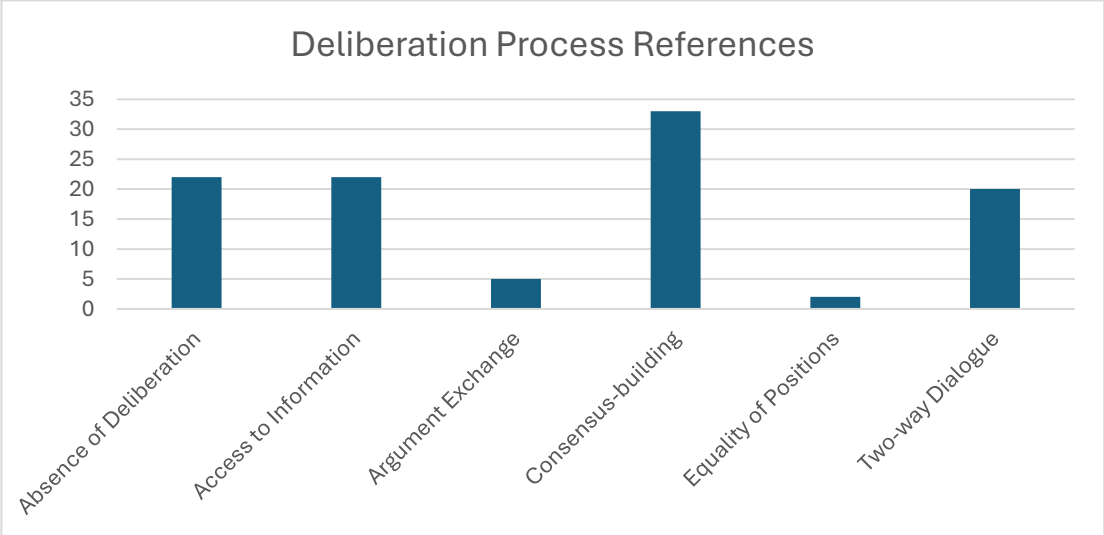
Gambar 3. Hasil Coding Dimensi Partisipasi

Sumber : Hasil olahan peneliti berdasarkan *coding* NVivo (2026).

Berdasarkan hasil analisis, *Sustainability of Participation* merupakan subdimensi yang paling dominan dengan total 35 *coding references*. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar studi governance kebencanaan di Indonesia menempatkan keberlanjutan keterlibatan masyarakat sebagai elemen utama dalam membangun *disaster resilience*. Partisipasi masyarakat dipahami tidak hanya sebagai keterlibatan sementara pada saat bencana, tetapi juga sebagai proses jangka panjang yang berkaitan dengan *adaptive resilience*, keberlanjutan komunitas, *volunteer continuity*, dan *community-based disaster governance* (Lassa et al., 2023; Saputra et al., 2025; Yumarni & Amaratungga, 2017). Selain itu, *Participation in Planning* (31 *coding references*) dan *Inclusiveness of Participation* (30 *coding references*) juga menunjukkan frekuensi yang tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa literatur *governance* kebencanaan di Indonesia banyak menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan mitigasi, kesiapsiagaan bencana, serta keterlibatan kelompok rentan, seperti perempuan, relawan lokal, masyarakat terdampak, dan komunitas akar rumput. Partisipasi tersebut umumnya diwujudkan melalui musyawarah komunitas, *contingency planning*, *collaborative mitigation planning*, dan diskusi kesiapsiagaan antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan menuju governance yang lebih *community-centered* dan partisipatif. *Participation in Implementation* juga muncul cukup dominan

dengan 25 *coding references*, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi praktis partisipasi masyarakat, seperti mitigasi berbasis komunitas, pengelolaan relawan, *preparedness activities*, *early warning systems*, dan respons bencana kolektif (Fitriyati et al., 2024; Junaidi et al., 2025; Muhamad et al., 2025). Namun demikian, tingginya *Pseudo-participation* (21 *coding references*) menunjukkan bahwa sebagian studi masih menemukan bentuk partisipasi yang bersifat birokratis dan tokenistik, di mana masyarakat dilibatkan secara administratif tetapi belum memiliki pengaruh substantif dalam pengambilan keputusan kebencanaan. Sementara itu, *Participation in Evaluation* menjadi subdimensi dengan frekuensi terendah, yaitu hanya 2 *coding references*. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program kebencanaan masih relatif terbatas dibandingkan tahap perencanaan dan implementasi. Secara keseluruhan, dimensi *Participation* dalam literatur governance kebencanaan Indonesia didominasi oleh keberlanjutan partisipasi, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, partisipasi inklusif, dan implementasi berbasis komunitas. Namun, tingginya *pseudo-participation* menunjukkan bahwa governance kebencanaan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan partisipasi deliberatif yang substantif dan setara (Alhadi et al., 2024; Danar, 2025; Fekete, 2021).

Dimensi Proses Deliberative



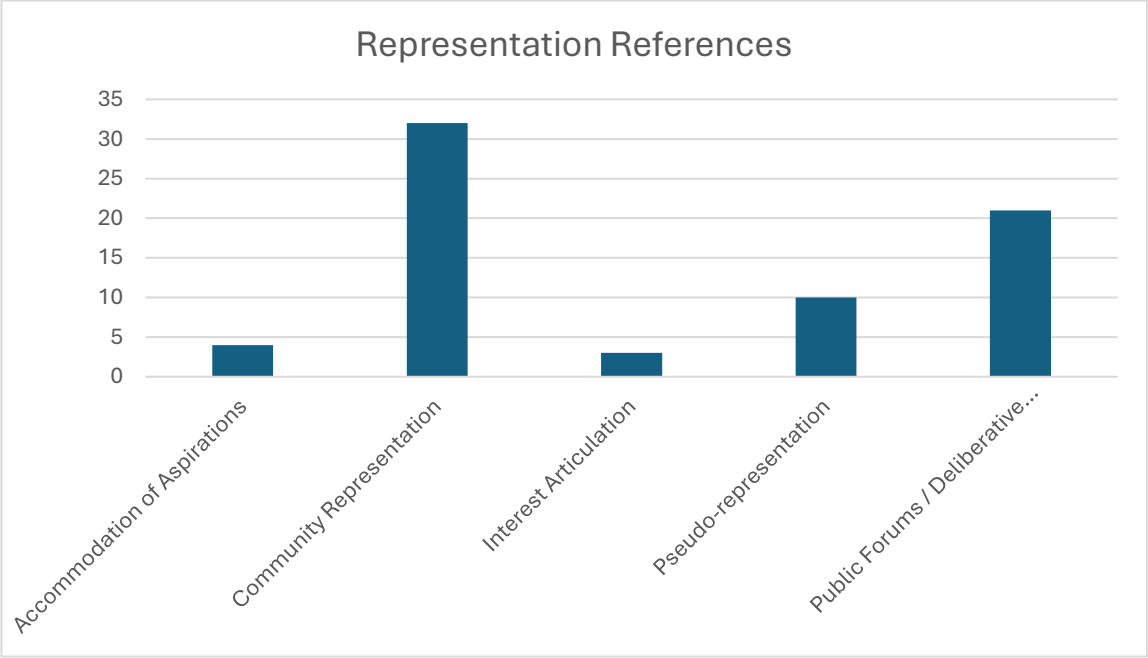
Gambar 4. Hasil Coding Proses Deliberasi
Sumber : Hasil olahan peneliti berdasarkan *coding* NVivo (2026).

Berdasarkan hasil analisis, *Consensus-building* merupakan subdimensi yang paling dominan dalam dimensi *Deliberation Process* dengan total 33 *coding references*. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar studi *governance* kebencanaan di Indonesia menekankan pentingnya pembangunan konsensus, koordinasi antar-*stakeholder*, dan *collaborative governance* dalam pengurangan risiko bencana. *Governance* kebencanaan yang efektif umumnya dibangun melalui kerja sama komunitas, forum koordinasi, *collective decision-making*, dan *collaborative preparedness* antara masyarakat, pemerintah, relawan, dan organisasi lokal (Lassa et al., 2023; McDermott et al., 2025; Muhamad et al., 2025). Subdimensi *Access to Information* dan *Absence of Deliberation* masing-masing memperoleh 22 *coding references*.

Tingginya *Access to Information* menunjukkan bahwa penyebaran informasi kebencanaan, *early warning systems*, pendidikan kebencanaan, dan komunikasi risiko merupakan elemen penting dalam membangun kesiapsiagaan dan *adaptive resilience* masyarakat. Sebaliknya, tingginya *Absence of Deliberation* mengindikasikan masih kuatnya praktik *governance* yang bersifat *top-down*, terbatasnya ruang dialog, serta minimnya keterlibatan substantif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebencanaan. Selain itu, *Two-way Dialogue* memperoleh 20 *coding references*, yang menunjukkan bahwa komunikasi dua arah mulai berkembang dalam konteks *community-based disaster governance*, *collaborative mitigation*, koordinasi relawan, dan *participatory communication*. Namun, *Argument Exchange* dan *Equality of Positions* hanya memperoleh masing-masing 5 dan 2 *coding references*. Temuan ini menunjukkan bahwa isu pertukaran argumentasi, kesetaraan posisi antaraktor, dan relasi kekuasaan masih relatif jarang dibahas dalam literatur kebencanaan di Indonesia.

Dengan demikian, *governance* kebencanaan di Indonesia masih lebih berorientasi pada koordinasi praktis, *collaborative action*, dan konsensus operasional dibanding deliberasi substantif yang menempatkan seluruh aktor pada posisi yang setara.(Dalimunthe, 2018; Ida et al., 2025; Junaidi et al., 2025; Putera et al., 2025). Secara keseluruhan, dimensi *Deliberation Process* dalam literatur *governance* kebencanaan Indonesia didominasi oleh *consensus-building*, *access to information*, dan *two-way communication*. Namun, tingginya *Absence of Deliberation* menunjukkan bahwa banyak praktik *governance* kebencanaan masih bersifat birokratis dan belum sepenuhnya menyediakan ruang deliberatif yang substantif bagi masyarakat terdampak.

Dimensi Representasi



Gambar 5. Hasil *Coding* Dimensi Representasi
Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan *coding* NVivo (2026).

Berdasarkan hasil analisis, *Community Representation* merupakan subdimensi yang paling dominan dengan total 32 *coding references*. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar studi governance kebencanaan di Indonesia menempatkan masyarakat terdampak, relawan lokal, komunitas akar rumput, dan kelompok perempuan sebagai aktor penting dalam *resilience governance* dan *community-based disaster management*. Selain itu, *Public Forums/Deliberative Spaces* juga menunjukkan frekuensi yang tinggi (21 *coding references*), yang mengindikasikan meningkatnya perhatian terhadap forum komunitas, musyawarah kebencanaan, dan ruang deliberatif publik sebagai sarana koordinasi serta komunikasi antaraktor. Temuan tersebut mencerminkan adanya kecenderungan menuju tata kelola kebencanaan yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Meskipun demikian, *Pseudo-representation* masih muncul cukup signifikan dengan 10 *coding references*. Hal ini menunjukkan bahwa representasi masyarakat dalam beberapa studi masih bersifat tokenistik dan administratif, di mana kelompok masyarakat dan kelompok rentan secara formal dianggap terwakili, tetapi belum memiliki pengaruh substantif dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa governance kebencanaan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan representasi yang inklusif dan setara (Ida et al., 2025; Setijaningrum et al., 2024; Yumarni & Amaratungga, 2017). Sebaliknya, *Accommodation of Aspirations* dan *Interest*

Articulation memperoleh frekuensi yang rendah, masing-masing hanya 4 dan 3 *coding references*. Temuan ini mengindikasikan bahwa literatur governance kebencanaan di Indonesia masih lebih berfokus pada keterwakilan komunitas dan pelibatan masyarakat dalam forum kolaboratif dibanding pada dinamika representasi politik, artikulasi kepentingan, dan relasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan kebencanaan. Secara keseluruhan, dimensi representasi dalam literatur kebencanaan Indonesia masih belum sepenuhnya bersifat substantif dan deliberatif (Dalimunthe, 2018; Fekete, 2021). Temuan ini diperkuat oleh Khanifah dan Maharani (2026) yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktor semi-pemerintah tidak selalu memperkuat kolaborasi, tetapi dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan apabila tidak didukung oleh mekanisme partisipatif dan transparan. Dengan demikian, kualitas tata kelola kebencanaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi, tetapi juga oleh kualitas representasi, kesetaraan posisi antaraktor, dan proses deliberasi yang berlangsung (Khanifah & Maharani, 2026).

Pembahasan

Hasil *systematic literature review* menunjukkan bahwa dimensi Participation menjadi dimensi *deliberative governance* yang paling dominan dalam literatur governance kebencanaan di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar studi masih berorientasi pada *community engagement*, *community-based resilience*, dan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya frekuensi bencana, keterbatasan kapasitas negara, serta kuatnya solidaritas komunitas lokal dalam menghadapi bencana. Dalam konteks ini, masyarakat diposisikan sebagai aktor utama dalam mitigasi berbasis komunitas, *volunteer disaster response*, *preparedness activities*, dan *adaptive resilience practices*. Dominasi *subdimensi Sustainability of Participation* dan Participation in Planning menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan tanggap darurat menuju *resilience governance* yang lebih berkelanjutan melalui penguatan relawan, kesiapsiagaan komunitas, dan *collaborative mitigation planning* (Ansell & Gash, 2008; Norris et al., 2008). Meskipun demikian, tingginya *pseudo-participation* menunjukkan bahwa sebagian governance kebencanaan masih bersifat birokratis dan administratif, di mana masyarakat dilibatkan secara formal tetapi belum memiliki pengaruh substantif dalam pengambilan keputusan. Pada dimensi *Deliberation Process*, subdimensi *Consensus-building*, *Access to Information*, dan *Two-way Dialogue* menjadi elemen yang paling dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa governance kebencanaan Indonesia relatif kuat dalam koordinasi komunitas, komunikasi kolaboratif, dan penyebaran informasi. Namun, tingginya *Absence of Deliberation* memperlihatkan masih kuatnya praktik *top-down*, lemahnya ruang dialog substantif, serta minimnya

kesetaraan posisi antaraktor. Dengan demikian, governance kebencanaan Indonesia masih lebih berorientasi pada *collaborative coordination dan implementation-based governance* dibanding deliberasi substantif. Sementara itu, *Representation* menjadi dimensi dengan frekuensi terendah. Isu representasi kelompok rentan, *disability inclusion*, *women representation*, dan artikulasi kepentingan masyarakat masih relatif terbatas dalam literatur kebencanaan Indonesia. Meskipun demikian, *women-centered governance* dan *disability-sensitive governance* mulai berkembang sebagai bagian penting dari *resilience governance* yang lebih inklusif (Alhadi et al., 2024; Danar, 2025; Fekete, 2021). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *deliberative governance* relatif lebih berkembang pada *flood governance* dan *volcanic governance* karena tingginya frekuensi bencana, kuatnya keterlibatan komunitas lokal, serta kebutuhan koordinasi jangka panjang. Secara keseluruhan, governance kebencanaan di Indonesia cenderung berkembang menuju *participatory governance*, *collaborative governance*, dan *community-centered resilience governance*. Namun, tantangan terkait representational equality, substantive deliberation, dan pengurangan *pseudo-participation* masih perlu diperkuat agar tercipta *governance* kebencanaan yang lebih *deliberatif* dan inklusif (Arnstein, 1969).

KESIMPULAN

Hasil **systematic literature review** menunjukkan bahwa **Participation** merupakan dimensi **deliberative governance** yang paling dominan dalam literatur governance kebencanaan di Indonesia, terutama pada subdimensi **Sustainability of Participation**, **Participation in Planning**, dan **Inclusiveness of Participation**. Temuan ini menunjukkan bahwa governance kebencanaan di Indonesia masih berorientasi pada **community engagement**, **collaborative resilience**, dan **participatory disaster governance**. Meskipun demikian, tingginya **Absence of Deliberation** mengindikasikan bahwa governance kebencanaan masih menghadapi kelemahan deliberatif yang cukup signifikan, meskipun subdimensi **consensus-building**, **access to information**, dan **two-way dialogue** telah berkembang dalam berbagai studi. Sementara itu, **Representation** menjadi dimensi dengan frekuensi terendah, yang menunjukkan bahwa isu representasi kelompok rentan, kesetaraan suara, dan artikulasi kepentingan masyarakat masih relatif terbatas dalam literatur kebencanaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa governance kebencanaan di Indonesia telah berkembang menuju **participatory** dan **collaborative governance**, namun masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan **substantive deliberation**, **inclusive representation**, dan pengurangan *pseudo-participation*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam kajian mengenai **representational equality**, **gender-sensitive governance**, **disability-inclusive governance**, serta **local*

*wisdom-based deliberative governance** dalam konteks pengurangan risiko bencana di Indonesia.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Temuan penelitian menunjukkan bahwa governance kebencanaan di Indonesia masih didominasi oleh dimensi *Participation* dibanding *Deliberation Process* dan *Representation*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa governance kebencanaan lebih berorientasi pada keterlibatan administratif masyarakat dibanding deliberasi substantif sebagaimana dikemukakan dalam kerangka *deliberative governance* (Kismartini et al., 2024). Masyarakat umumnya diposisikan sebagai aktor implementasi, relawan, dan *adaptive resilience actor*, namun belum sepenuhnya berperan sebagai aktor deliberatif yang memiliki posisi setara dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini memperkuat argumentasi *collaborative governance* dan *community resilience theory* yang menekankan pentingnya kolaborasi komunitas, koordinasi multi-*stakeholder*, dan *community engagement* dalam membangun *disaster resilience*. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa *local wisdom governance* memiliki kontribusi penting dalam governance kebencanaan di Indonesia. Nilai gotong royong, solidaritas komunitas, *volunteer culture*, dan *local preparedness practices* merupakan elemen penting dalam menjaga keberlanjutan partisipasi dan memperkuat *collaborative resilience governance*(Kamila et al., 2026; Lassa et al., 2023; Muhamad et al., 2025). Namun demikian, tingginya *pseudo-participation* dan rendahnya dimensi *Representation* menunjukkan bahwa governance kebencanaan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan *inclusive governance*, *equality of positions*, dan *substantive deliberative process*. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa *deliberative governance* dalam konteks kebencanaan di Indonesia masih berada pada tahap *participatory-collaborative governance* dan belum sepenuhnya berkembang menjadi *fully substantive deliberative governance* (Ansell & Gash, 2008; Norris et al., 2008).

REFERENCES

Alhadi, Z., Rahman, A., Yusran, R., & Yuliarti. (2024). Policy Analysis for Handling Environmental Damage based on Disaster Mitigation in Nagari Air Dingin, Solok Regency. *International Journal of Environmental Impacts*, *07*(04), 769–780. https://doi.org/10.18280/ijei.070417

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arni, Y., Fitri, E. A., Rahayu, C., & Darsin, D. (2026). The integration of local stilt house architecture in natural disaster mitigation education in South Sumatra, Indonesia. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, *18*(1). https://doi.org/10.4102/jamba.v18i1.1987

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Dalimunthe, S. A. (2018). Who Manages Space? Eco-DRR and the Local Community. *Sustainability*, *10*(6), 1705. https://doi.org/10.3390/su10061705

Danar, O. R. (2025). The Role of Collaboration in Supporting Community Resilience Programmes in Post-Disaster Events. *Hrvatska i Komparativna Javna Uprava*, *24*(4), 657–684. https://doi.org/10.31297/hkju.24.4.2

Djalante, R. (2016). *Research trends on hazards, disasters, risk reduction and climate change in Indonesia: A systematic literature review*. Dissemination, Education, Outreach and Teaching. https://doi.org/10.5194/nhess-2016-112

Fekete, A. (2021). Increasing flood risk awareness and warning readiness by participation – But who understands what under 'participation'? *International Journal of Disaster Risk Reduction*.

Fitriyati, N., Arifin, H. S., Kaswanto, & Marimin. (2024). Towards a Resilient and Sustainable City: New Paradigm of Flood Disaster Governance Study Case Bekasi City. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, *19*(9), 3393–3404. https://doi.org/10.18280/ijsdp.190910

Hartono Hartono, Jose Da Silva, Francisco Da Costa, Donny Melianto, & Made Suparta. (2025). Implementasi Metode Analisis Menggunakan NVivo dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management and Creative Business*, *3*(2), 191–198. https://doi.org/10.30640/jmcbus.v3i2.4652

Hermawan, A., Guntoro, B., & Sulhan, M. (2024). Community Engagement for Disaster Preparedness in Rural Areas of Mount Merapi, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, *19*(4), 1505–1518. https://doi.org/10.18280/ijsdp.190427

Houghton, C., Murphy, K., Meehan, B., Thomas, J., Brooker, D., & Casey, D. (2017). From screening to synthesis: Using NVIVO to enhance transparency in qualitative evidence synthesis. *Journal of Clinical Nursing*, *26*(5–6), 873–881. https://doi.org/10.1111/jocn.13443

Ida, R., Kinasih, S. E., Wahyudi, I., & Romadhona, M. K. (2025). Women's involvements in communication forum for disaster management and resilience in eruption of Mount Semeru, Lumajang, East Java. *Discover Social Science and Health*, *5*(1), 152. https://doi.org/10.1007/s44155-025-00307-0

Junaidi, A. H., Hariani, H., & Nur, M. (2025). Analysis of the internal and external factors supporting and inhibiting community empowerment in disaster management based on disaster-resilient villages. *Healthcare in Low-Resource Settings*, *13*(2). https://doi.org/10.4081/hls.2025.12918

Kamila, A. C. S., Septanaya, I. D. M. F., Shaw, R., Pamungkas, A., & Larasati, K. D. (2026). Factors influencing return migration after disaster relocation: Housing dissatisfaction and place attachment in the 2021 Mount Semeru eruption, Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *133*, 106007. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2026.106007

Kepala BNPB. (2025). *PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG DESA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA*.

Khafian, N. (2023). The Role Of Collaborative Governance In Indonesian Disaster Management. *Journal of Governance and Administrative Reform*, *4*(2), 158–175. https://doi.org/10.20473/jgar.v4i2.53367

Khalwani, K. M., Alkaf, M., & Hendroyono, B. (2026). PENGUATAN COLLABORATIVEGOVERNANCESEKTOR KEHUTANAN: PEMBELAJARAN DARI BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI SUMATERA UTARA. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, *13*(1).

Khanifah, L. N., & Maharani, B. K. (2026). Analysis of Collaborative Governance in Managing Ketapang Urban Aquaculture (KUA) Tourism Village in Tangerang Regency. *Jurnal Pemerintahan dan Politik UIGM*, *11*(2), 472–493. https://doi.org/10.36982/jpp.v11i2.7085

Kismartini, K., Warsono, H., Wasiq Hidayat, J., Pujiyono, B., Murtadho Yusuf, I., & Nurul Huda, M. (2024). Deliberative Governance Principles in Forest Areas Management with Special Purposes. *Policy & Governance Review*, *8*(2), 154. https://doi.org/10.30589/pgr.v8i2.864

Kusumah, D. O. S., Ferdryansyah, M., Hidayat, E. N., & Yaakop, A. Y. (2026). Community Participation in Mangrove Management for Coastal Disaster Mitigation: Evidence from an Indonesian Coastal City. *Indian Journal of Information Sources and Services*, *16*(2), 720–730. https://doi.org/10.51983/ijiss-2026.16.2.72

Lassa, J. A., Amri, A., Tebe, Y., Towers, B., & Haynes, K. (2023). Exploring NGOs-government collaboration strategies in institutionalising child-centred disaster resilience and climate change adaptation. *Progress in Disaster Science*, *18*, 100284. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2023.100284

McDermott, R., Sagala, S., Susetyo, N. A., Insan, A., Harahap, W. D. P., Indrarini, A., & Azhari, D. (2025). The role of digital participation platforms in risk-informed development: A case study of Surabaya, Indonesia. *Progress in Disaster Science*, *26*, 100430. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2025.100430

Muhamad, H., Abdulah, D. C., Ariani, N., & Afdal, A. (2025). COMMUNITY PARTICIPATION AND SOCIAL RECONSTRUCTION POST NATURAL DISASTERS BASED ON LOCAL WISDOM IN SIGI DISTRICT CENTRAL SULAWESI PROVINCE. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, *9*(2), 668–677. https://doi.org/10.22437/jiituj.v9i2.37009

Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness. *American Journal of Community Psychology*, *41*(1–2), 127–150. https://doi.org/10.1007/s10464-007-9156-6

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement:

An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pratama, P. Y., & Nurmandi, A. (2020). Collaborating network in managing post the Mount Merapi's disruption, Indonesia. *Jàmbá Journal of Disaster Risk Studies*, *12*(1). https://doi.org/10.4102/jamba.v12i1.927

Purworini, D., Etika Rahmawati, L., Darmastuti, R., Setyawan, S., & Triyono, A. (2026). Connecting the dots: Pathways to fostering communicative processes of resilience in village tourism organizations as a response to the pandemic crisis. *Frontiers in Communication*, *11*, 1760691. https://doi.org/10.3389/fcomm.2026.1760691

Putera, R. E., Fathani, A. T., Lenggogeni, S., & Asrinaldi. (2025). Tourism disaster management dilemmas: Insights from Mandalika, Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, *11*, 101400. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101400

Roza Krisnandhi Kausar, D. & Agustan. (2025). Disaster Management in Tourism: Public-Private Collaboration and Early Warning Innovations in Bali and Yogyakarta. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, *15*(2), 582–600. https://doi.org/10.24843/JKB.2025.v15.i02.p06

Saputra, E., Reinhart, H., Musthofa, A., Rofi, A., Nu'mah, A. K., & Saiddinullah, A. (2025). The political ecology of disasters: The impact of knowledge/power on the responses to urban coastal disasters in Pekalongan, Indonesia. *Geo: Geography and Environment*, *12*(1), e70006. https://doi.org/10.1002/geo2.70006

Setijaningrum, E., Kassim, A., Soegiono, A. N., & Ariawantara, P. A. F. (2024). Beyond tokenism, toward resilience: Furthering a paradigmatic shift from intersecting narratives of disaster and disability realities in East Java, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, *10*(1), 2319376. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2319376

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Universitas Islam Bandung, Indonesia, Rochim, M., Bajari, A., Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia, Damayanti, N. A., Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia, Bakti, I., & Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia. (2020). Community-Based Disaster Communication Management. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, *36*(4), 339–350. https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3604-21

Yumarni, T., & Amaratungga, D. (2017). Resource Capability of Local Governments in Mainstreaming Gender into Disaster Risk Reduction: Evidence from Bantul Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, *28*(3), 178. https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.2